

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- A. M. Yunus Wahid. 2016. *Pengantar Hukum Tata Ruang*. Prenada Media Group. Jakarta.
- A. Ridwan Halim. 1985. *Pengantar Ilmu Hukum dalam Tanya Jawab*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Abdul Manan. 2006. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Kencana. Jakarta.
- Abdur H. Rahman dan Soejono. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Achmad Ali. 2017. *Menguak Tabir Hukum*. Prenada Media Group. Jakarta.
- , 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Kencana. Jakarta.
- Adrian Sutedi. 2011. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Barda Nawawi Arief. 2013. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Citra Aditya. Bandung.
- Dudu Duswara Machmuddin. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum-Sebuah Sketsa*. Refika Aditama. Bandung.
- H. Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik. 2016. *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*. Nuansa Cendekia. Bandung.
- Irwansyah dan Ahsan Yunus. 2020. *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Mirra Buana Media. Yogyakarta.
- Juniarso Ridwan. 2010. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Nuansa. Bandung.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2018. *Metode penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Kencana Prenada Media Group. Depok.
- Muhammad Sadi Is. 2017. *pengantar Ilmu Hukum*. Prenada Media Group. Jakarta.
- Munir Fuady. 2007. *Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekuasaan, Hukum, dan Masyarakat*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- N.H.T. Siahaan. 2004. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Erlangga. Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2019. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Prenada Media Group. Jakarta Timur.

- Philipus M. Hadjon. 2015. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia Introduction to the Indonesia Administrative Law*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- R. Soeroso. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Ridwan HR. 2018. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Raja Grafindo Persada. Depok
- S. T. Kansil. 1992. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Salim H.S da Erlis Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*. Rajawali Press. Jakarta.
- Soedjono Dirdjosisworo. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*. Rajawali Press. Jakarta.
- Soejono dan H. Abdurrahman. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Soejono Soekanto. 2007. *Factor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo. Jakarta.
- , 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Rajawali. Jakarta.
- , 1982. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali. Jakarta.
- Utang Rasyidin dan Dedi Supriyadi. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia dari Tradisi Ke Konstitusi*. CV. Pustaka Setia. Bandung.

Makalah:

- Tumiar Sidauruk. *Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau di Perkotaan*. Makalah. Universitas Negeri Medan. Medan.

Penelitian (Skripsi, Tesis, dan Disertasi):

- Andi Winda Sari. 2017. *Pelaksanaan Pelayanan Publik Dalam Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Di Kota Palopo*. Program Studi Hukum Administrasi Negara Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Irsan. 2013. *Tinjauan Yuridis atas Izin Mendirikan Bangunan dalam Penataan Ruang di Kabupaten Jayapura*. Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin. Makas sar.
- Marcus Priyo Gunarto. 2011. *Kriminalisasi dan Penalisisasi dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*. Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Semarang.
- Rahmat. 2018. *Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pengawasan Izin Mendirikan Bangunan di Sempadan Pantai*

Di Kabupaten Pinrang. Program Studi Hukum Administrasi Negara Universitas Hasanuddin. Makassar.

Suci Hajratul Aswad. 2021. *Tinjauan Yuridis Terhadap Perizinan Pertambangan Pasir Laut untuk Makassar New Port di Perairan Spermonde.* Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

Wawancara:

Faisal Burhan, Wawancara, Kepala Bidang Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, 19 Mei 2021.

Berita Pada Surat Kabar Online:

<https://www.antaraneews.com/berita/2023401/pemkot-makassar-akan-tinjau-ulang-izin-pembangunan-twin-tower>. Di akses 2 Juni 2021

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung,
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007 tentang
Penataan Ruang,
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah,
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan
Pemerintah Daerah,
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 Tentang
Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan,
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung,
Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 15 Tahun 2004 tentang Tata
Bangunan,
Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar 2015-2034,
Peraturan Walikota Makassar Nomor 20 tahun 2014 tentang Tata Cara
Pemberian Izin Pada Pemerintah Kota Makassar,

Peraturan Walikota Makassar Nomor 69 Tahun 2016 tentang Izin Pemanfaatan, Penataan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar.

LAMPIRAN



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU DAN SATU PINTU
Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 8 Telpn 0411-436 488
MAKASSAR 90144

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/489/ DPMPSTSP /VII/2021

Yang Bertanda Tandan dibawah ini :

Nama : **NUR INTAN ABDULLAH, SE,MM**
NIP : 19700730 200112 2 001
Pangkat /Gol : Pembina / IV.a
Jabatan : Subbagian Umum dan Kepegawaian

Menyatakan bahwa Mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama : MARIANAS
NIM : B021171008
Jurusan : Hukum Adm Negara / UNHAS

Benar telah Di terima Melakukan **PENELITIAN** pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar mulai tanggal 1 s/d 30 Juli 2021.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 02 Juli 2021

An. KEPALA DINAS
Subbagian Umum dan Kepegawaian



NUR INTAN ABDULLAH, SE,MM

PANGKAT : Pembina

NIP : 19700730 200112 2 001